

ABSTRAK

Sebagian besar dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak bukanlah iuran sukarela tetapi iuran wajib yang dapat dipaksakan sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang memiliki peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun, terkadang wajib pajak lalai untuk membayar pajak bahkan cenderung menghindari untuk membayar pajak. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi wajib pajak yang lalai akan kewajibannya, yang mana salah satunya dengan cara memberikan surat paksa kepada wajib pajak. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas oleh penulis adalah mengenai pengaruh pelaksanaan penagihan dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Cibeunying.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan pada wajib pajak yang dilakukan pada KPP Cibeunying. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode deskriptif analitis yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisa fakta sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti dan menghasilkan suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, yang mana pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dilakukan untuk memaksa wajib pajak membayar kewajibannya dengan masih diberi tenggang waktu. Tenggang waktu disini dari waktu jatuh tempo pembayaran pajak masih diberi tenggang waktu 7 hari dari dikeluarkannya Surat Teguran. Jika wajib pajak masih belum juga membayar, maka dalam waktu 21 hari kemudian surat paksa akan diterbitkan.

Dalam pelaksanaannya yang mana sudah cukup memadai, tetapi dapat disimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan penagihan surat paksa belum sesuai dengan harapan di KPP Pratama Bandung Cibeunying, dalam tingkat pencairan mengalami persentase kenaikan atau penurunan yang tidak menentu pada tahun 2007 dalam triwulan pertama dan kedua dimana terjadi kenaikan dari 2.45% menjadi 4.58%, tetapi pada triwulan selanjutnya mengalami penurunan drastis menjadi 2.41%. Dalam tingkat kepatuhannya data diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap seksi penagihan di KPP Pratama Cibeunying menunjukkan bahwa jumlah jawaban “Ya” diperoleh sebesar 66.4% dimana berada diantara 0,51-0,75 yang berarti dalam penagihan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh atau memiliki hubungan yang baik pada KPP Cibeunying. maka KPP Cibeunying diharapkan meningkatkan pelayanannya kepada wajib pajak, menerapkan sanksi perpajakan untuk menegakkan peraturan perpajakan, dan melakukan pembinaan aparatur perpajakan agar bertindak jujur, simpatik, dan tegas dalam melakukan tugasnya, juga Penyuluhan Pajak sebagai suatu sumber informasi perpajakan, dan perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam memberikan informasi kepada wajib pajak atau masyarakatnya mengenai peraturan yang berlaku sehingga wajib pajak atau masyarakat dapat memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian	4
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data	9
1.7 Lokasi dan Waktu	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	11
2.1.1 Pengertian Pajak	11
2.1.2 Fungsi Pajak	14
2.1.3 Penggolongan Pajak	15
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak	16
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	17

2.1.6 Tarif Pajak	18
2.2 Pemeriksaan Pajak	20
2.2.1 Peraturan Perpajakan	21
2.2.1.1 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak	21
2.2.1.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak	22
2.2.2 Tujuan Pemeriksa Pajak	23
2.2.3 Norma Pemeriksaan Pajak	25
2.2.3.1 Norma Pemeriksaan Pajak	25
2.2.3.1.1 Norma Pemeriksaan Lapangan	25
2.2.3.1.2 Norma Pemeriksaan Kantor.....	27
2.2.3.2 Norma Pelaksanaan Pemeriksaan	28
2.2.3.3 Norma Wajib Pajak	29
2.2.4 Pedoman Pemeriksaan Pajak	30
2.2.5 Metode Pemeriksaan Pajak	32
2.3 Penagihan Pajak	
2.3.1 Dasar Penagihan Pajak	34
2.3.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak	42
2.3.2.1 Penagihan Sekaligus dan Sekaligus	43
2.3.2.2 Penagihan Pajak dengan Tenggang Waktu Tertentu	44
2.3.2.2.1 Surat Teguran	45
2.3.2.2.2 Surat Paksa	46
2.3.2.2.3 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	47
2.3.2.2.4 Lelang	49

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	52
3.1.1 Sejarah Singkat KPP Bandung Cibeunying	52
3.1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPP Cibeunying	58
3.1.3 Aktivitas KPP Cibeunying.....	60
3.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPP Cibeunying	61
3.2 Metode Penelitian	73
3.2.1 Langkah Penelitian	73
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	74
3.2.3 Operasional Variabel	75
3.2.4 Analisis Pengujian Hipotesis	76
3.3 Penarikan Simpulan	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	79
4.1.1 Dasar Hukum Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa.....	79
4.1.2 Penerbitan Surat Paksa	79
4.1.3 Pemberitahuan Surat Paksa	83
4.2 Hasil Pembahasan	86
4.2.1 Perbandingan Persentase Tingkat Pencairan dari Pelaksanaan di KPP Cibeunying	86
4.2.2 Deskripsi Persepsi Responden mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	91

4.2.3 Pengaruh Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di tinjau dari Persepsi PenagihanPajak di KPP Cibeunying	92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung
- Lampiran 2 Perbandingan Persentase Tingkat Pencairan dari Pelaksanaan Surat Paksa di KPP Cibeunying (per triwulan)
- Lampiran 3 Daftar Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4 Rincian Jawaban Responden atas Variabel Penagihan Surat paksa
- Lampiran 5 Sumber data KPL.KPP.7.4

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Tabel 4.1 Kronologis Penagihan Pajak dengan Jangka Waktu

Tabel 4.2 Total Pencairan KPL. KPP.7.4

Tabel 4.3 Jumlah Jawaban Responden atas Variabel Penagihan Surat Paksa

Tabel 4.4 Jumlah Jawaban Responden atas Variabel tingkat Kepatuhan wajib pajak

Tabel 4.5 Skor Jawaban Responden atas Variabel penagihan surat paksa dengan Variabel Tingkat Kepatuhan wajib Pajak